



PENDEKATAN PENDIDIKAN DALAM KAJIAN ISLAM (DARI DIKOTOMI MENUJU DEKOLONISASI: REKONSTRUKSI PENDIDIKAN ISLAM ERA KONTEMPORER BERBASIS EPISTEMOLOGI TAUHID)

Lailatul Qadariyah¹

¹STAI Nurud Dhalam, Indonesia

Corresponding Author: Lailatul Qadariyah

E-mail: lailatulqadariyah89@gmail.com

Received: Feb 12, 2026	Revised: March 01, 2026	Accepted: March 03, 2026	Online: March 08, 2026
ABSTRAK Pendidikan Islam menghadapi problem dikotomi ilmu yang memisahkan ilmu agama dan ilmu umum sebagai akibat dari dinamika internal sejarah Islam serta pengaruh kolonialisme dan sekularisme Barat. Pemisahan ini melahirkan dualisme sistem pendidikan, melemahkan integrasi nilai spiritual dan rasionalitas ilmiah, serta berdampak pada ketertinggalan pendidikan Islam dalam merespons perkembangan sains dan teknologi modern. Artikel ini bertujuan menganalisis proses terbentuknya dikotomi ilmu dalam pendidikan Islam, menjelaskan urgensi dekolonisasi epistemologi sebagai upaya membebaskan pendidikan dari dominasi paradigma Barat, serta menawarkan epistemologi tauhid sebagai dasar rekonstruksi pendidikan Islam yang integratif dan holistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data diperoleh melalui penelaahan sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti karya klasik dan kontemporer tentang epistemologi Islam, sejarah pendidikan, dan teori dekolonisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan langkah reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi, dan penarikan kesimpulan untuk memastikan koherensi argumentasi dan keterlacakan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikotomi ilmu terbentuk secara gradual akibat pergeseran orientasi keilmuan pada akhir masa klasik Islam dan diperkuat oleh sistem pendidikan kolonial yang dualistik. Dekolonisasi epistemologi menjadi penting untuk mengembalikan otoritas dan relevansi pengetahuan Islam. Epistemologi tauhid dipandang sebagai fondasi rekonstruksi pendidikan Islam karena menegaskan kesatuan wahyu dan akal, sehingga mampu membangun sistem pendidikan yang seimbang secara intelektual, moral, dan spiritual dalam menghadapi tantangan globalisasi. Kata Kunci: dikotomi ilmu, dekolonisasi epistemologi, epistemologi tauhid, pendidikan Islam, integrasi ilmu			

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Qadariyah, L. (2026). Pendekatan Pendidikan dalam Kajian Islam (Dari Dikotomi Menuju Dekolonisasi: Rekonstruksi Pendidikan Islam Era Kontemporer Berbasis Epistemologi Tauhid). *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 12(1), 133-148. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.490>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam masa kini menghadapi tantangan kompleks di tengah globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial yang cepat. Posisi pendidikan Islam kerap dipandang kurang strategis dibanding pendidikan umum sehingga dukungan kebijakan dan

pendanaan masih terbatas. Dampaknya terlihat pada kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter generasi muda. Problematika lain muncul dari dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang menghambat daya saing lulusan. Faktor internal mencakup kurikulum kurang adaptif dan kompetensi guru yang belum optimal, sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh budaya Barat, ketimpangan akses, serta tuntutan modernisasi yang terus berkembang di berbagai bidang kehidupan (Hisbullah Nurdin, 2020).

Krisis pendidikan Islam dipicu ketidakmampuan sistem beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nilai moral tergerus materialisme dan individualisme, tujuan pendidikan kurang terarah, serta kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Globalisasi, hedonisme, dan sekularisme melemahkan identitas Islam. Revolusi digital dan industri 4.0 memperparah kondisi karena kompetensi digital guru serta fasilitas terbatas. Kurikulum yang belum mengintegrasikan iman, sains, dan teknologi, kualitas pendidik rendah, ketimpangan akses, serta dikotomi ilmu agama dan umum semakin memperdalam krisis dan menghambat daya saing lulusan (Khalid Abdurrahman, 2025).

Dampak krisis pendidikan Islam sangat luas, mencakup melemahnya pendidikan karakter dan meningkatnya perilaku negatif seperti kekerasan, korupsi, serta krisis makna hidup. Lulusan kurang siap bersaing secara global dan minim internalisasi nilai moral. Erosi spiritualitas akibat globalisasi, kurikulum tidak adaptif, serta kesenjangan mutu antarlembaga memperburuk citra pendidikan Islam. Kondisi ini berisiko melahirkan generasi yang tidak holistik dan memperdalam degradasi moral nasional, termasuk di lembaga seperti madrasah (Huzma Juliantri, 2023). Pada masa awal Islam, khususnya era Kekhalifahan Umayyah, ilmu agama dan ilmu umum berkembang secara terpadu tanpa dikotomi. Ulama dan ilmuwan mengkaji fikih, tafsir, astronomi, hingga kimia secara harmonis dengan dukungan politik. Dikotomi mulai menguat pada akhir Kekhalifahan Abbasiyah akibat konflik internal, invasi Mongol, serta kritik rasionalisme oleh Al-Ghazali melalui karyanya *Tahafut al-Falasifah*, yang memprioritaskan ilmu naqli dibanding aqli (Nurjamilatul Muhairira & Sudirman, 2024).

Sejak abad pertengahan, dikotomi ilmu dalam Islam menguat setelah kritik Al-Ghazali terhadap filsafat rasionalis, yang membedakan ilmu agama sebagai *fardhu 'ain* dan ilmu akal sebagai *fardhu kifayah*. Kemunduran pasca abad ke-12 diperparah invasi Mongol ke Baghdad serta kolonialisme Barat abad ke-19 yang membawa sistem sekuler. Di Indonesia, pendidikan dualistik warisan Belanda memisahkan pesantren dan sekolah umum. Perdebatan ini serupa dengan konflik Galileo Galilei dan Charles Darwin dengan otoritas gereja, yang turut memengaruhi pemikiran Muslim modern (Ali Sodikin, 2020).

Dikotomi ilmu merupakan pemisahan antara ilmu agama yang bersumber dari wahyu dan ilmu umum yang bersifat sekuler seperti sains dan teknologi. Fenomena historis ini memengaruhi pendidikan dunia Islam dan melahirkan dualisme pembelajaran. Padahal, dalam Islam seluruh ilmu berasal dari Allah dan bersifat terpadu, sehingga pemisahan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembentukan karakter dan kepribadian manusia (Nurjamilatul Muhairira & Sudirman, 2024). Dikotomi ilmu merujuk pada pemisahan tegas antara ilmu agama yang bersumber dari wahyu dan berorientasi

akhirat, dengan ilmu umum yang berbasis akal serta observasi empiris dan berfokus pada urusan dunia. Pemisahan ini melahirkan dualisme pendidikan dan cara pandang yang memisahkan agama dari sains. Padahal, dalam perspektif Islam, ilmu bersifat holistik. Perintah iqra' mencakup ayat qauliyah dan kauniyah, sehingga ilmu agama dan ilmu umum seharusnya terintegrasi serta saling melengkapi dalam membangun peradaban (Anggun et.al, 2018).

Kolonial epistemik merujuk pada dominasi paradigma pendidikan Barat yang menganggap pengetahuan Eropa dan Amerika bersifat universal serta superior, sementara pengetahuan lokal dipinggirkan. Dalam praktiknya, kurikulum dan metode pengajaran menekankan rasionalitas, empirisme, dan efisiensi ekonomi, sering mengabaikan dimensi spiritual, budaya, dan etika masyarakat non-Barat. Fenomena ini menjadi bentuk kekuasaan intelektual berkelanjutan, karena narasi dan standar pengetahuan global masih banyak dikendalikan oleh pusat-pusat akademik Barat, sehingga membatasi kemandirian epistemologis negara berkembang (Azmy Abdurrahman, et.al, 2025).

Di Indonesia, dominasi epistemik Barat bermula pada kolonialisme Belanda melalui sistem pendidikan sekuler untuk kepentingan ekonomi penjajah. Paradigma ini memicu dualisme antara ilmu umum modern dan ilmu agama tradisional. Dampaknya masih terasa dalam kurikulum nasional, memperkuat marginalisasi pengetahuan lokal dan pendidikan Islam (Fathusy Syarif, et.al, 2025). Kolonialisme epistemik dalam pendidikan merujuk pada anggapan bahwa pengetahuan Barat lebih unggul dan menjadi standar kemajuan. Pandangan ini tampak dalam pengajaran bahasa, sejarah, dan studi agama yang dianggap netral, tetapi sarat perspektif Eropa-Amerika. Dalam kajian Islam, pendekatan Barat kerap mendominasi tafsir Al-Qur'an dan mengabaikan tradisi ulama klasik. Akibatnya, terjadi ketimpangan otoritas pengetahuan. Gerakan dekolonisasi hadir untuk menantang dominasi tersebut melalui integrasi khazanah intelektual Islam dengan pendekatan ilmiah kontemporer secara kritis dan dialogis (Achmad Syariful, et.al, 2025).

Dampak dikotomi ini sangat terasa dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Pada zaman penjajahan, pesantren dan madrasah berjalan sendiri-sendiri tanpa bantuan, sementara sekolah-sekolah ala Barat lebih diutamakan. Setelah Indonesia merdeka, keadaan ini masih berlanjut dengan adanya perbedaan kurikulum yang mencolok. Aspek kognitif dan ekonomi yang berasal dari Barat lebih mendominasi, sementara nilai-nilai moral dan spiritual kurang diperhatikan.

Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang cara pandang terhadap ilmu pengetahuan agar wahyu dan akal dapat berjalan seiringan. Salah satu caranya adalah melalui konsep Islamisasi ilmu yang pernah diusulkan oleh tokoh seperti Al-Attas. Namun, upaya tersebut memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana dikotomi ilmu terbentuk dalam sejarah pendidikan Islam sehingga melahirkan pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Selain itu, diperlukan pula kesadaran tentang pentingnya dekolonisasi epistemologi sebagai langkah untuk membebaskan sistem pendidikan Islam dari dominasi paradigma Barat yang cenderung sekuler dan reduksionis. Dalam konteks ini, epistemologi tauhid menjadi sangat penting sebagai dasar rekonstruksi pendidikan Islam, karena mampu menghadirkan kerangka keilmuan yang integratif dan menempatkan

wahyu serta akal sebagai sumber pengetahuan yang saling melengkapi. Meskipun demikian, berbagai tantangan tetap harus dihadapi, seperti penolakan dari sebagian kalangan akademisi serta kemungkinan munculnya bentuk penjajahan gaya baru apabila proses dekolonisasi tidak dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak.

MEODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji secara historis dan konseptual munculnya dikotomi ilmu dalam pendidikan Islam. Sumber data terdiri atas sumber primer berupa karya-karya klasik dan modern tentang konsep ilmu dalam Islam, sejarah pendidikan Islam, serta kritik terhadap filsafat rasional, termasuk karya Al-Ghazali seperti *Tahafut al-Falasifah*, serta literatur mengenai perkembangan intelektual pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah; sedangkan sumber sekunder mencakup artikel jurnal bereputasi, buku akademik, dan disertasi yang relevan dalam dua dekade terakhir. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data akademik seperti Google Scholar dan portal jurnal terindeks dan diseleksi berdasarkan relevansi substansi, kredibilitas penerbit, dan kontribusi konseptual. Data yang terpilih didokumentasikan dan dikodekan secara tematik berdasarkan periode sejarah, faktor penyebab, dan implikasi pendidikan, lalu dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan historis-kritis untuk mengidentifikasi pola pemikiran, perubahan orientasi keilmuan, serta konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dikotomi Pendidikan dalam Sejarah Pendidikan Islam

Dalam kajian keilmuan Islam, ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu ilmu *naqliyah* dan ilmu *aqliyah*. Ilmu *naqliyah* adalah ilmu yang bersumber dari wahyu Allah, seperti Al-Qur'an dan Hadis, yang mencakup bidang fikih, tauhid, tafsir, tasawuf, dan bahasa Arab. Sementara itu, ilmu *aqliyah* adalah ilmu yang diperoleh melalui akal dan penelitian, seperti filsafat, matematika, kedokteran, astronomi, dan ilmu-ilmu modern lainnya. Pembagian ini pernah dijelaskan oleh Ibn Khaldun untuk memudahkan proses pembelajaran, bukan untuk memisahkan kedua jenis ilmu secara kaku. Dalam Islam, ilmu *naqliyah* dan ilmu *aqliyah* seharusnya saling melengkapi karena keduanya berasal dari Allah SWT dan bertujuan menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan kehidupan dunia manusia (Miftakhul Munir, 2021).

Ilmu *naqliyah* adalah pengetahuan yang bersumber dari wahyu seperti Al-Qur'an dan Hadis, mencakup fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan sejarah Islam. Ilmu ini bersifat normatif dan spiritual serta bertujuan membentuk akhlak dan membimbing kehidupan menuju kebahagiaan akhirat. Adapun ilmu *aqliyah* diperoleh melalui akal dan metode empiris, meliputi matematika, sains, ekonomi, dan sosiologi yang berorientasi pada pemahaman realitas dunia. Dalam Islam, keduanya bukan dipisahkan secara mutlak, melainkan diklasifikasikan demi kemudahan kajian. Keduanya saling melengkapi agar

tercapai keseimbangan antara iman, akal, dan tindakan manusia (Afifah Nur Azizah, et.al, 2025).

Perbedaan ilmu agama dan ilmu umum lebih dipengaruhi sekularisasi Barat pasca-*Renaissance* akibat konflik gereja dan ilmuwan seperti Galileo Galilei. Pengaruh ini masuk ke dunia Islam melalui kolonialisme. Padahal pada era Kekhalifahan Abbasiyah di bawah Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun, ilmu berkembang terpadu melahirkan Ibn Sina, Al-Khwarizmi, dan Ibn al-Haytham. Abul Hasan Ali Hasani Nadwi mengkritik sekularisme yang mengikis nilai ketuhanan dalam ilmu (Mahyuddin Hashim, et.al, 2018).

Pemisahan ilmu *naqliyah* dan *aqliyah* lebih dipengaruhi sekularisme Barat sejak *Renaissance* yang memisahkan agama dari sains akibat konflik gereja dan ilmuwan seperti Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei. Pengaruh ini masuk ke dunia Islam melalui kolonialisme dan modernisasi, memicu kemunduran antara abad ke-13–19. Padahal pada era Kekhalifahan Abbasiyah, lembaga Baitul Hikmah melahirkan tokoh seperti Ibn Sina, Al-Khwarizmi, dan Ibn Khaldun yang memadukan wahyu dan akal secara harmonis (Sri Baniah, 2022).

Pemisahan ilmu agama dan ilmu umum menimbulkan dampak serius dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Ilmu pengetahuan berkembang tanpa fondasi etika dan spiritualitas, sementara ilmu agama terlepas dari konteks empiris. Di banyak negara Muslim, kondisi ini berkontribusi pada lambatnya kemajuan sains serta munculnya problem moral. Ilmu yang hanya bertumpu pada akal cenderung materialistis, sedangkan agama tanpa nalar kritis menjadi kaku. Ian Barbour menilai relasi sains dan agama seharusnya dialogis dan integratif. Tanpa integrasi, pendidikan Islam berisiko tertinggal dan kehilangan relevansi menghadapi tantangan global (Mahyuddin Hashim, et.al, 2018).

Dalam Islam, ilmu dipahami sebagai kesatuan utuh; wahyu memberi pedoman nilai, akal menelaah realitas. Ibn Khaldun menolak pemisahan mutlak dan menekankan integrasi melalui *ijtihad kontekstual*. Konsep integrasi *naqli–aqli* sejalan dengan Islamisasi ilmu yang menyelaraskan akidah, syariah, dan akhlak. Praktiknya tampak di Universiti Sains Islam Malaysia dan Universitas Islam Negeri yang memadukan sains dan nilai Al-Qur'an. Integrasi ini membentuk insan seimbang, adaptif terhadap globalisasi tanpa kehilangan identitas keislaman (Miftakhul Munir, 2021).

1. Akar Historis Dikotomi

Pada masa kolonial, Belanda menerapkan sistem pendidikan diskriminatif: sekolah pribumi hanya memberi pelajaran dasar untuk mencetak tenaga kerja, sedangkan sekolah Eropa memperoleh kurikulum Barat berbahasa Belanda. Kebijakan Politik Etis tampak progresif, namun tetap berorientasi kepentingan kolonial, sekaligus melahirkan kaum terpelajar berkesadaran nasional. Pendidikan Islam tertekan oleh Ordonansi Sekolah Liar, tetapi beradaptasi melalui sistem klasikal dan integrasi pelajaran umum. Organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mendirikan madrasah modern sebagai respons terhadap dominasi kolonial (Khusnan Iskandar & Ahmad Syahrul Ansori, 2022).

Penjajahan Belanda dan Jepang memberi dampak besar terhadap pendidikan Islam tradisional. Pada masa Belanda, kebijakan diskriminatif seperti pengawasan guru agama dan persaingan dengan sekolah Kristen menyebabkan munculnya pemisahan antara ilmu

agama dan ilmu umum serta perubahan orientasi pendidikan dari spiritual ke arah yang lebih material. Meskipun demikian, pesantren tetap bertahan dengan mengadopsi beberapa metode modern seperti penggunaan meja dan papan tulis serta melahirkan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Pada masa Jepang, kebijakan pendidikan lebih keras, seperti pembatasan penggunaan teks Arab, pengurangan pelajaran agama, dan penerapan kurikulum militer, meskipun Jepang juga memberikan izin bagi berdirinya sekolah tinggi Islam sebagai bagian dari propaganda. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam mampu bertahan dan bertransformasi melalui perkembangan madrasah yang memadukan pelajaran agama dan ilmu umum tanpa meninggalkan identitas keislamannya (Choirun Niswah et.al, 2025).

Kebijakan pendidikan Jepang berbeda dari Belanda karena lebih menekankan sistem militer dan penyeragaman sekolah. Pendidikan diarahkan untuk mendukung kepentingan perang melalui indoktrinasi dan pelatihan kerja. Bahasa Belanda dilarang dan bahasa Indonesia dikembangkan. Meskipun mutu pendidikan rendah, Jepang memperluas akses pendidikan dasar bagi masyarakat dan menghapus perbedaan etnis dalam sekolah (Syarifah, et.al, 2024).

Penjajahan mewariskan dampak ganda dalam pendidikan: modernisasi dan kesadaran nasional, tetapi juga diskriminasi dan krisis identitas, sehingga pascakemerdekaan dilakukan penyesuaian kurikulum berbasis nilai lokal. Dalam tradisi Islam awal pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, ilmu terintegrasi tanpa dikotomi. Era Kekhalifahan Umayyah dan Kekhalifahan Abbasiyah menunjukkan perkembangan ilmu terpadu. Pengelompokan hanya untuk kemudahan belajar, bukan pemisahan kaku, karena seluruh ilmu saling berkaitan (Akhmad Asyari & Rusni Bil Makruf, 2014).

Di Indonesia, pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum semakin kuat sejak masa penjajahan Belanda melalui penerapan sistem pendidikan ganda untuk mengendalikan masyarakat pribumi. Belanda mendirikan sekolah modern ala Barat yang ditujukan bagi kalangan priyayi untuk mencetak pegawai pemerintahan kolonial, sementara masyarakat umum lebih banyak belajar di lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren dan madrasah yang berfokus pada ilmu agama. Kebijakan ini didorong oleh kepentingan kolonial seperti mencari dukungan politik, meningkatkan tenaga kerja terdidik, serta mempertahankan perbedaan sosial melalui strategi adu domba. Pemerintah kolonial juga menerapkan berbagai peraturan seperti pengawasan terhadap guru agama dan pembatasan sekolah swasta untuk mengendalikan perkembangan pendidikan Islam. Akibatnya muncul anggapan bahwa ilmu agama dan ilmu umum merupakan dua bidang yang terpisah, sehingga menimbulkan stigma pemisahan antara lembaga pendidikan yang masih berpengaruh hingga sekarang dan menghambat upaya integrasi ilmu (Abdul Basyit, 2019).

Setelah Indonesia merdeka, warisan sistem pendidikan ganda dari masa penjajahan masih tetap terasa meskipun berbagai upaya penyatuan telah dilakukan. Pemerintah mengakui dua jalur pendidikan, yaitu sekolah umum yang lebih berorientasi pada pendidikan sekuler dan madrasah yang menekankan pendidikan agama, sehingga pemisahan kelembagaan tetap berlangsung. Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 hanya

memasukkan pelajaran agama ke sekolah umum tanpa sepenuhnya mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Pada masa Orde Baru, SKB Tiga Menteri tahun 1975 menyamakan kedudukan madrasah dengan sekolah umum melalui kurikulum yang memadukan pelajaran umum dan agama sehingga ijazahnya diakui setara. Selanjutnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 memperkuat posisi madrasah serta mewajibkan pendidikan agama di semua jenjang. Namun karena pengelolaan pendidikan masih terpisah, sistem ganda tetap bertahan sehingga diperlukan upaya integrasi ilmu agama dan ilmu umum agar pendidikan menjadi lebih seimbang (Abdul Basyit, 2019).

2. Dampak Dikotomi

a. Fragmentasi keilmuan

Dikotomi ilmu menyebabkan dualisme pendidikan karena ilmu agama dan ilmu umum diajarkan tanpa hubungan epistemologis yang jelas. Akibatnya pendidikan tidak terintegrasi, peserta didik berpikir terbatas, dan terjadi kesenjangan antara penguasaan ilmu agama serta sains dan teknologi (Dede Lukman, et.al, 2024). Dikotomi ilmu juga menimbulkan konflik identitas akademik pada pelajar Muslim karena mereka merasa harus memilih antara menjadi religius atau berpikir rasional. Akibatnya perkembangan ilmu yang menyeluruh terhambat. Di Indonesia, warisan pendidikan kolonial memperkuat pemisahan antara madrasah yang berfokus pada agama dan sekolah umum yang berorientasi sekuler (Samrin, 2013).

b. Reduksi tujuan pendidikan Islam

Secara ideal, pendidikan Islam bertujuan mewujudkan prinsip tauhid dengan membentuk manusia yang taat kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Namun dikotomi ilmu mempersempit tujuan tersebut karena pendidikan lebih menekankan aspek agama saja. Akibatnya integrasi ilmu terabaikan dan pembentukan manusia yang seimbang antara spiritualitas dan pengetahuan tidak tercapai (Dumyati, et.al, 2023).

c. Krisis integritas moral dan intelektual peserta didik

Dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum dapat menimbulkan krisis moral karena ilmu sering dipandang hanya sebagai alat praktis tanpa landasan nilai dan etika. Akibatnya peserta didik cenderung berorientasi pada kepentingan duniawi dan melupakan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Pemisahan ini juga menyebabkan hilangnya adab karena ilmu agama dan ilmu umum tidak lagi saling melengkapi, sehingga etika keilmuan menjadi lemah dan muncul berbagai masalah moral seperti perundungan, penyalahgunaan media sosial, dan krisis spiritual. Selain itu, dikotomi melahirkan generasi dengan identitas yang terpecah, yaitu memiliki kecerdasan intelektual tetapi kurang kuat secara moral karena pendidikan sains tidak diimbangi dengan nilai-nilai agama, sehingga mereka mengalami kebingungan antara mempertahankan identitas keislaman dan mengikuti tuntutan modernitas (Khairul Abrar, et.al., 2025).

Secara intelektual, dikotomi ilmu menyebabkan pengetahuan terpecah dan menghambat perkembangan pemikiran. Siswa sering bingung antara religiusitas dan rasionalitas sehingga kemampuan berpikir kritis melemah. Ilmu agama menjadi terbatas

pada ritual, sedangkan ilmu umum kehilangan arah nilai, sehingga lulusan pendidikan Islam kurang percaya diri dan sulit bersaing (Muhamad Parhan, et.al., 2022).

Dekolonisasi Pendidikan Islam: Kerangka Teoretis

Dekolonisasi epistemologi adalah upaya membebaskan ilmu pengetahuan dari dominasi perspektif Barat dengan mengembangkan cara memahami dunia yang lebih sesuai dengan pengalaman dan tradisi lokal. Proses ini mencakup pencarian alternatif dalam cara mengetahui, metode penelitian, dan pemahaman tentang realitas agar ilmu pengetahuan tidak hanya bergantung pada paradigma Barat. Dekolonisasi tidak sekadar menolak pengaruh kolonial, tetapi juga membangun ilmu yang lebih relevan dan objektif melalui dialog antara berbagai tradisi keilmuan. Konsep ini muncul sebagai kritik terhadap dominasi ilmu Barat sejak era Renaisans dan Pencerahan yang sering digunakan untuk membenarkan kolonialisme serta meminggirkan pengetahuan lokal. Tujuan dekolonisasi epistemologi adalah menciptakan ilmu yang lebih inklusif melalui komunikasi antarbudaya dan pengakuan terhadap berbagai bentuk pengetahuan. Gagasan ini berkembang sejak gerakan perlawanan terhadap kolonialisme dan kemudian menjadi kajian akademik yang menekankan pentingnya kemandirian intelektual bagi masyarakat bekas jajahan (Cipto Handriyanto, et.al., 2025).

1. Kritik terhadap hegemoni ilmu Barat

Dekolonisasi epistemologi mengkritik dominasi ilmu Barat yang dianggap paling objektif dan universal, padahal sering meminggirkan pengetahuan lokal. Dominasi ini menciptakan ketidakadilan pengetahuan dan menghapus kontribusi peradaban non-Barat. Dekolonisasi bertujuan mengembangkan ilmu yang lebih adil dengan mengakui berbagai perspektif dan nilai-nilai lokal (Achmad Syariful Afif, et.al., 2025).

2. Upaya pembebasan cara berpikir umat Islam

Dalam kajian Islam, dekolonisasi epistemologi bertujuan membebaskan studi keislaman dari pengaruh orientalis dan sekuler serta membangun ilmu berdasarkan pandangan dunia Islam melalui islamisasi ilmu dan pembaruan pemikiran yang dinamis (Erfan Efendi, 2014). Dekolonisasi dalam pemikiran Islam tidak berarti menolak seluruh pengaruh Barat, tetapi memperbaiki cara memahami ilmu agar sesuai dengan nilai dan konteks Islam serta tetap terbuka terhadap dialog ilmiah. Dalam pendidikan Islam di Indonesia, dekolonisasi dilakukan dengan memperkuat dasar filosofis pendidikan, menghidupkan kembali tradisi keilmuan, dan melawan dominasi cara berpikir Barat agar umat Islam memiliki kemandirian intelektual serta kehormatan ilmiah (Sauqi Futaqi, 2018). Dekolonisasi epistemologi membebaskan pola pikir umat Islam dari dominasi kolonial melalui pembongkaran warisan ilmu Barat dan revitalisasi *turath*. Upaya ini mendorong kedaulatan berpikir, pengembangan kajian Islam yang mandiri dan kontekstual, serta memungkinkan umat Islam berkontribusi dalam diskursus global tanpa kehilangan jati diri keilmuan dan nilai-nilai keislaman (Erfan Efendi, 2014).

3. Kurikulum, metode, dan orientasi pendidikan

Dekolonisasi epistemologi mendorong perubahan kurikulum pendidikan dengan memasukkan perspektif sejarah dan pengetahuan lokal untuk mengurangi dominasi Barat serta menghargai keberagaman budaya. Di Indonesia, hal ini berarti meninjau warisan

kolonial dalam kurikulum dan memperkuat identitas pesantren melalui integrasi ilmu agama dan umum. Dekolonisasi juga mengubah metode pembelajaran menjadi lebih dialogis, partisipatif, dan humanis, sejalan dengan nilai spiritual dan budaya lokal. Pendidikan diarahkan sebagai sarana emansipasi yang menumbuhkan kesadaran kritis, menjaga identitas keilmuan Islam, serta memungkinkan peserta didik berkembang secara mandiri dan kontekstual di tengah perubahan global (Rizki Ramadan, 2025).

4. Tokoh dan Gagasan Dekolonisasi Pendidikan Islam

a. Ismail Raji al-Faruqi (Islamisasi Ilmu)

Ismail Raji al-Faruqi (1921–1986) adalah pemikir Muslim modern yang menggagas islamisasi ilmu sebagai upaya dekolonisasi pendidikan Islam. Berasal dari Palestina dan menempuh pendidikan di Beirut, Amerika Serikat, dan Al-Azhar, ia mengembangkan gagasan integrasi ilmu modern dengan warisan intelektual Islam untuk mengatasi dualisme pendidikan sekuler dan tradisional. Islamisasi ilmu didasarkan pada prinsip tauhid yang menekankan kesatuan Tuhan, ciptaan, pengetahuan, kehidupan, dan umat manusia. Al-Faruqi merumuskan langkah sistematis untuk memahami ilmu modern, mengkaji turath Islam, melakukan evaluasi kritis, serta menyusun kembali disiplin ilmu dalam perspektif Islam agar ilmu memiliki dimensi etis, spiritual, dan bermanfaat bagi peradaban umat manusia. (A Khudori Soleh, 2011)

b. Syed Muhammad Naquib al-Attas (*Loss of Adab*)

Syed Muhammad Naquib al-Attas (1931) adalah pemikir Muslim kontemporer yang berpengaruh dalam gagasan dekolonisasi dan islamisasi ilmu. Ia menilai krisis umat Islam disebabkan penjajahan epistemologis Barat yang memisahkan ilmu dari tauhid. Menurutnya, masalah utama adalah hilangnya adab yang menimbulkan kekacauan ilmu dan kepemimpinan. Solusinya adalah ta'dib, yaitu pendidikan berbasis adab untuk membentuk manusia berilmu sekaligus bermoral dan berperadaban (Saleh, 2020).

c. Paulo Freire (kesadaran kritis – relevansi metodologis)

Paulo Freire (1921–1997) melalui *Pedagogy of the Oppressed* mengkritik pendidikan kolonial yang bersifat “gaya bank”, yaitu siswa hanya menjadi penerima pasif pengetahuan. Ia menawarkan pendidikan pembebasan melalui kesadaran kritis, dialogis, praksis, dan humanisasi. Gagasannya relevan bagi dekolonisasi pendidikan Islam karena mendorong pembelajaran yang membebaskan dan membangun kesadaran sosial (Prasetya, S. A., et.al, 2021).

Epistemologi Tauhid sebagai Fondasi Pendidikan Islam

1. Pengertian Epistemologi Tauhid

Tauhid merupakan prinsip dasar akidah Islam yang menegaskan keesaan Allah sekaligus menjadi fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam filsafat ilmu Islam. Secara ontologis, tauhid memandang Allah sebagai Wujud Mutlak, sedangkan alam dan manusia adalah ciptaan yang bergantung kepada-Nya; manusia berperan sebagai hamba dan khalifah. Secara epistemologis, tauhid menempatkan wahyu sebagai sumber utama ilmu, sementara akal dan pengalaman menjadi pelengkap yang harus selaras dengan wahyu, sehingga menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Secara aksiologis, tauhid mengarahkan ilmu untuk ibadah dan kemaslahatan, dengan nilai keadilan, amanah,

dan rahmat. Dengan demikian, tauhid membentuk paradigma keilmuan yang integratif, etis, dan spiritual, berbeda dari paradigma sekuler yang cenderung memisahkan ilmu dari nilai-nilai keagamaan (Salistya Irfani & Siswanto, 2025).

2. Sumber Pengetahuan dalam Islam

Epistemologi Islam memandang ilmu sebagai kesatuan yang utuh berdasarkan prinsip tauhid, dengan tiga sumber utama: wahyu, akal, dan pengalaman empiris. Wahyu menjadi sumber kebenaran tertinggi yang memberi arah moral dan spiritual, akal berfungsi memahami dan mengembangkan pengetahuan, sedangkan pengalaman empiris memberikan bukti nyata melalui observasi. Ketiganya saling melengkapi dalam sistem pengetahuan yang harmonis, sering dirumuskan dalam pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Integrasi ini menghasilkan ilmu yang holistik dan bermakna, berbeda dengan epistemologi Barat yang cenderung memisahkan agama dari sains serta membatasi pengetahuan pada rasio dan empirisme semata (Fahmi, K. et.al., 2024).

3. Implikasi Epistemologi Tauhid terhadap Pendidikan

Epistemologi tauhid merupakan fondasi filosofis ilmu dalam Islam yang menempatkan keesaan Allah sebagai sumber utama pengetahuan sekaligus paradigma yang mengintegrasikan realitas, ilmu, dan nilai moral. Berbeda dengan pendekatan sekuler yang memisahkan ilmu dari nilai spiritual, epistemologi tauhid memandang ilmu sebagai sarana mengenal dan mengabdikan kepada Allah, sehingga ilmu tidak bersifat netral, melainkan memiliki orientasi etis dan religius. Sumber pengetahuan meliputi wahyu, akal, dan pengalaman empiris yang saling melengkapi tanpa dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Prinsip tauhid melandasi gagasan islamisasi ilmu sebagaimana dikemukakan oleh Ismail Raji al-Faruqi melalui konsep kesatuan Tuhan, ciptaan, pengetahuan, kehidupan, dan umat manusia. Syed Muhammad Naquib al-Attas juga menekankan perlunya pembebasan ilmu dari pengaruh sekuler dan pengembalian orientasi spiritual serta adab. Dalam pendidikan, epistemologi tauhid mendorong integrasi ilmu dan nilai melalui kurikulum yang menyatukan aspek intelektual dan moral, menghapus pemisahan ilmu, serta membentuk karakter berakhlak. Dengan demikian, pendidikan berbasis tauhid menghasilkan manusia berilmu yang tetap berlandaskan spiritualitas dan mampu berkontribusi pada peradaban yang adil dan bermakna (Tutik Haryanti & Amril M, 2024).

4. Pendidikan sebagai proses *tazkiyah*, *ta'dib*, dan *ta'lim*

Epistemologi tauhid merupakan dasar pengetahuan dalam Islam yang menegaskan Allah sebagai sumber utama ilmu dan realitas. Tauhid bukan hanya keyakinan teologis, tetapi juga paradigma keilmuan yang menyatukan aspek keberadaan, cara memperoleh pengetahuan, dan nilai dalam satu kesatuan. Dalam pendidikan Islam, epistemologi tauhid mengarahkan proses pendidikan untuk membentuk manusia yang seimbang secara intelektual, spiritual, dan moral melalui pengakuan terhadap keesaan Allah.

Pendidikan Islam dipahami sebagai integrasi tiga unsur utama, yaitu *tazkiyah* (penyucian jiwa), *ta'dib* (pembentukan adab), dan *ta'lim* (pengajaran ilmu). *Tazkiyah* membersihkan jiwa agar siap menerima kebenaran, *ta'dib* membentuk akhlak dan kesadaran akan posisi yang tepat dalam tatanan ciptaan, sedangkan *ta'lim* memberikan

pengetahuan berdasarkan wahyu dan akal. Ketiga unsur ini saling melengkapi dalam bingkai tauhid.

Konsep ini menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu, tetapi juga pembentukan insan bertauhid. *Ta'dib* dipandang sebagai inti pendidikan karena mencakup penyucian jiwa dan pengajaran ilmu sekaligus, sehingga ilmu tetap terikat pada nilai tauhid dan tidak terpisah antara ilmu agama dan ilmu umum (Sassi, K., 2020).

Rekonstruksi Pendidikan Islam Era Kontemporer

1. Prinsip-prinsip Rekonstruksi

Rekonstruksi pendidikan Islam bertujuan memperbarui paradigma agar mampu menjawab tantangan globalisasi dan krisis karakter. Melalui prinsip integratif, holistik, dan transformatif, pendidikan diarahkan membentuk insan kamil yang seimbang secara intelektual, spiritual, emosional, dan sosial (Eva Yenida, et.al., 2025). Rekonstruksi dalam pemikiran Islam adalah upaya memperbarui sistem pengetahuan dan kehidupan sosial berdasarkan nilai tauhid dan keadilan. Tujuannya mewujudkan masyarakat yang harmonis, etis, dan berkelanjutan melalui integrasi ilmu, spiritualitas, tanggung jawab sosial, serta pembebasan dari kesenjangan (Mushoffah, 2023).

- a. Integratif, holistik, dan transformatif, Prinsip integratif menekankan penyatuan ilmu agama dan ilmu rasional dalam kerangka tauhid untuk menghindari dikotomi pengetahuan. Integrasi dilakukan melalui kurikulum tematik yang menghubungkan sains dengan nilai Al-Qur'an serta mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Prinsip holistik memandang pendidikan sebagai proses menyeluruh yang mencakup dimensi intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini menekankan keterhubungan ilmu dan kehidupan, keterbukaan akses pendidikan, serta keseimbangan perkembangan manusia. Melalui prinsip integratif dan holistik, rekonstruksi pendidikan Islam diarahkan pada pembentukan insan kamil yang berilmu, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas spiritual dan budaya (Saifuddin, 2023). Prinsip transformatif menekankan perubahan pendidikan dari sekadar penyampaian ilmu menjadi proses pembentukan nilai, kesadaran kritis, dan spiritualitas. Melalui refleksi, dialog, dan tindakan nyata, peserta didik dibentuk menjadi pribadi reflektif, berdaya, dan berorientasi kepada Allah (Aulia Azizatul Hidayah & Nuril Huda, 2025).
 - b. Berbasis nilai tauhid dan keadilan sosial, Tauhid menjadi asas utama rekonstruksi yang menegaskan keselarasan antara Tuhan, manusia, dan alam, serta menyatukan ilmu modern dengan ajaran Islam tanpa dikotomi. Tauhid berfungsi sebagai landasan moral agar ilmu berorientasi spiritual. Bentuknya meliputi tauhid *dzati*, *sifati*, *af'ali*, dan *ubudiyah* sebagai dasar kesadaran spiritual (Mushoffah, 2023). Keadilan sosial menekankan pemerataan sumber daya, penghapusan kesenjangan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini digunakan untuk mengatasi kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan perubahan teknologi dengan menjadikan ilmu sebagai sarana pembebasan. Berlandaskan *maqashid syariah*, rekonstruksi bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh (Khairullina, A., & Siti Fathonah, 2024).
-

2. Rekonstruksi Kurikulum

Pembaruan kurikulum pendidikan Islam bertujuan menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman melalui integrasi ilmu wahyu, akal, dan pengalaman. Upaya ini menghapus dikotomi agama dan sains, berlandaskan tauhid, untuk membentuk peserta didik yang cerdas, spiritual, dan peka sosial serta sesuai konteks keindonesiaan.

- a. Integrasi ilmu agama dan sains, Integrasi ilmu agama dan sains menekankan keterhubungan metode ilmiah dan wahyu dalam satu kerangka pengetahuan. Sains dipahami sebagai sarana mengenal kekuasaan Tuhan, sebagaimana tradisi ilmuwan Muslim klasik. Kendalanya meliputi keterbatasan guru, kurikulum sekuler, dan riset terpadu, yang diatasi melalui pengembangan kurikulum integratif, pelatihan guru, dan kerja sama lembaga pendidikan (Ayu Savana Humairoh & Ahmad Mustafidin, 2025).
- b. Kontekstualisasi keilmuan dengan realitas umat, Pemikiran Al-Ghazali diterapkan dalam pendidikan modern melalui klasifikasi ilmu indrawi, rasional, dan ilahiah serta penekanan penyucian jiwa. Kurikulum mengintegrasikan hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam. Sementara itu, Quraish Shihab menekankan tafsir kontekstual agar pendidikan tidak sekadar hafalan, tetapi relevan dengan realitas sosial dan perkembangan teknologi (Ahmad Muzakkil, et.al., 2025).

3. Rekonstruksi Metodologi Pembelajaran

Pembaruan metode pembelajaran bertujuan menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman melalui pendekatan yang mendorong siswa berpikir kritis, bertanya, dan merefleksikan pengalaman belajar secara mandiri. Di Indonesia, pembaruan ini menghubungkan teori pendidikan dengan realitas sosial budaya serta mengembangkan pembelajaran yang membebaskan, adaptif terhadap teknologi, dan responsif terhadap keberagaman masyarakat.

- a. Pembelajaran kritis dan reflektif, Pembelajaran kritis memandang pengetahuan sebagai hasil dialog dan analisis sosial yang terus berkembang, sedangkan pembelajaran reflektif menekankan proses tindakan dan perenungan untuk memperbaiki diri. Keduanya dipadukan dalam metode pembelajaran kontekstual yang mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi, melalui dialog, tindakan-refleksi, fleksibilitas, serta penyesuaian dengan kondisi sosial budaya dan keberagaman pendidikan di Indonesia (Syamsurijal, et.al., 2025).
- b. Pendidikan pembebasan dan kesadaran tauhid, Pendidikan yang membebaskan menekankan kesadaran kritis untuk melawan dogmatisme dan literalisme yang membuat siswa pasif. Dalam Islam, pendekatan ini berlandaskan tauhid dengan mendorong perenungan ayat qauliyah dan kauniyah serta penggunaan akal secara kritis. Melalui metode dialogis dan partisipatif, peserta didik menjadi subjek aktif yang membangun kesadaran tauhid guna membebaskan diri dari pengaruh sekularisme dan materialisme (Muhammad Syauqi, 2025).

4. Rekonstruksi Tujuan Pendidikan Islam

- a. Pembentukan insan kamil, Pendidikan Islam bertujuan membentuk insan kamil, yaitu manusia yang seimbang secara spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Di era modern, tujuan ini perlu ditata ulang melalui penafsiran kontekstual Al-Qur'an, Hadis, dan

pemikiran ulama. Pendidikan harus mengintegrasikan wahyu dan akal serta mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik agar lahir generasi beriman, berilmu, adaptif, dan berakhlak mulia (Laila Kamilatu Rahmi, et.al., 2025).

- b. Keseimbangan spiritual, intelektual, dan sosial, Aspek spiritual merupakan inti pendidikan Islam untuk membentuk insan kamil melalui penguatan iman dan pembersihan hati. Pendidikan mengintegrasikan nilai etika dan spiritual agar bersifat transformatif serta menyeimbangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali, ilmu harus disertai muhasabah dan keikhlasan agar membangun kesadaran moral dan tanggung jawab transendental (Edo Feri Irawan & Fathur Rohman, 2025). Aspek intelektual menekankan berpikir kritis, adaptif, serta integrasi ilmu dan spiritualitas sebagaimana gagasan Al-Ghazali dan Fazlur Rahman. Aspek sosial menumbuhkan keadilan, empati, tanggung jawab, serta keseimbangan moral dalam pendidikan Islam modern menghadapi tantangan global dan Kurikulum Merdeka (Laila Kamilatu Rahmi, et.al., 2025).

Tantangan dan Peluang Implementasi

1. Tantangan Internal

- a. Resistensi institusional merupakan penolakan terhadap perubahan akibat budaya kaku, konflik internal, ketakutan karyawan, kurang dukungan pimpinan, serta keterbatasan sumber daya dan pelatihan. Di lembaga publik dan pendidikan Indonesia, hambatan birokrasi, ketidaksesuaian regulasi, dan rendahnya kesiapan organisasi sering menghambat reformasi, inovasi, serta implementasi kebijakan baru (Adhетиya Dwi Evriani, et.al., 2025).
- b. Permasalahan pendidikan di Indonesia mencakup kekurangan dan ketimpangan distribusi guru, terutama di wilayah 3T, kualifikasi serta literasi digital yang belum optimal, dan kesejahteraan rendah yang melemahkan motivasi. Dampaknya terlihat pada kualitas pembelajaran dan kesenjangan prestasi. Solusi menuntut pemerataan tenaga pendidik, peningkatan pelatihan, insentif layak, serta pemanfaatan teknologi (Yuda Permana, et.al., 2021).

2. Tantangan Eksternal

Globalisasi dan neoliberalisme mendorong pendidikan Indonesia ke arah logika pasar sejak reformasi 1998, dipengaruhi kebijakan lembaga internasional. Dampaknya meliputi komersialisasi, ketimpangan akses, penurunan orientasi karakter, tergerusnya budaya lokal, serta meningkatnya beban administratif guru. Di pendidikan tinggi, tuntutan pemeringkatan global sering mengorbankan aksesibilitas dan kualitas substantif (Salim, A., Manubey, J., & Kuswandi, D., 2024)

3. Peluang Pengembangan Pendidikan Islam

- a. Digitalisasi memberi peluang besar bagi pendidikan Islam di Indonesia melalui *e-learning*, AI, dan multimedia. Teknologi memperluas akses, mendorong inovasi pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru dan santri, serta mengefisienkan manajemen. Transformasi ini memungkinkan pendidikan Islam adaptif di era Society 5.0 tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman (Muhammad Fatkhul Hajri, 2023) .

-
- b. Pendidikan Islam perlu mengintegrasikan Al-Qur'an dan Hadis dengan sains serta ilmu sosial secara seimbang agar lahir lulusan beriman kuat dan adaptif. Gagasan ini diperkuat pemikiran Ian G. Barbour dan cendekiawan Muslim, serta dikembangkan di Universitas Islam Indonesia melalui dialog interdisipliner berbasis nilai Islam (Arif Aulia Rizki & Salmi Wati, 2025).

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa dikotomi ilmu dalam pendidikan Islam terbentuk melalui proses historis yang panjang, terutama sejak melemahnya tradisi rasional pada akhir masa klasik Islam yang ditandai oleh pergeseran orientasi keilmuan, konflik teologis, serta faktor sosial-politik seperti fragmentasi kekuasaan dan invasi eksternal. Kondisi tersebut mendorong prioritas berlebihan pada ilmu-ilmu naqli dan secara bertahap memarginalkan ilmu-ilmu *aqli*, sehingga lahir pemisahan institusional dan epistemologis antara ilmu agama dan ilmu umum dalam sistem pendidikan. Dekolonisasi epistemologi menjadi penting karena warisan kolonial modern turut memperkuat dikotomi tersebut melalui sistem pendidikan dualistik yang memisahkan madrasah dan sekolah umum, sekaligus menempatkan epistemologi Barat sebagai standar tunggal keilmuan. Tanpa dekolonisasi, pendidikan Islam akan terus berada dalam kerangka epistemik yang terfragmentasi dan kehilangan integritas ontologisnya. Dalam konteks ini, epistemologi tauhid menawarkan dasar rekonstruksi pendidikan Islam dengan menempatkan kesatuan Tuhan sebagai prinsip integratif seluruh realitas dan pengetahuan, sehingga wahyu, akal, dan pengalaman empiris dipahami sebagai sumber yang saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Dengan demikian, rekonstruksi pendidikan Islam berbasis tauhid bukan sekadar integrasi kurikulum, melainkan penataan ulang paradigma keilmuan yang memulihkan kesatuan ilmu, manusia, dan tujuan pendidikan dalam kerangka teosentris yang holistik

DAFTAR PUSTAKA

- Pamuji Pamuji, Azmy Abdurrahman, Ahmad Jaelani, Al Anshor, Setiyorini Setiyorini, Jusni Silalahi, & Rina Setyaningsih. (2025). Epistimologi Barat Modern: Dominasi, Kritik, dan Implikasi dalam Diskursus Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(1), 687–692. <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i1.5279>
- Abrar, K., Samad, D., & Mamad, F. S. (2025). Diskursus Kontemporer tentang Pendidikan Islam: Dikotomi, Islamisasi, Integrasi dan Interkoneksi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 14195–14202. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27522>
- Afif, A. S., dkk. (2025). Melawan Dominasi Epistemik: Tinjauan atas Dekolonisasi Studi Al-Qur'an dan Inklusivitas Pengetahuan. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 8(1). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.1256>
- Afifah Nur Azizah. (2025). Relevansi Epistemologi Ibnu Khaldun dalam Kurikulum Pendidikan Islam Kontemporer. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(4), 758–766. <https://doi.org/10.54259/diajar.v4i4.5536>
-

-
- Anam, A. M., dkk. (2025). Kontekstualisasi Pemikiran Filsafat Pendidikan Imam Al-Ghazali dan Muhammad Abduh. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 6(1), 73–88. <https://doi.org/10.22515/isnad.v6i01.11570>
- Asyari, A., & Makruf, R. B. (2014). Dikotomi Pendidikan Islam: Akar Historis dan Dikotomisasi Ilmu. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 8(2), 1–17. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v8i2.58>
- Hidayah, A. A., & Huda, N. . (2025). The Integration of Islamic Psychology in the PAI Curriculum for Strengthening Student Character and Mental Health. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(9), 5331–5338. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i9.1210>
- Evriani, A. D., dkk. (2025). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Tingkat Resistensi Perubahan dalam Organisasi Modern. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12). <https://doi.org/10.62281/hkrh0243>
- Fahmi, K., dkk. (2024). Epistemological Questions: Hubungan Akal, Penginderaan, Wahyu dan Intuisi pada Pondasi Keilmuan Islam. *Journal of Education Research*, 5(1). <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.753>
- Hashim, M., dkk. (2018). Konsep Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli dan Perbandingannya dengan Islamisasi. *JQSS – Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs*, 2(Special Issue). <https://doi.org/10.33102/jqss.vol0no0.22>
- Hajri, M. F. (2025). Pendidikan Islam di Era Digital: Tantangan dan Peluang pada Abad 21. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.3006>
- Handriyanto, C., dkk. (2025). Dekolonisasi Epistemik dalam Pendidikan Indonesia: Rekontekstualisasi Warisan Kolonial Belanda dalam Pembentukan Kurikulum Nasional. *Jurnal di Bidang Pengajaran dan Pendidikan*, 2(3), 409–416. <https://doi.org/10.69673/xp4dj332>
- Haryanti, T., & Amril, M. (2024). Konsep Tauhid Ismail Raji' Al-Faruqi dalam Islamisasi Ilmu. *Journal on Education*, 7(1), 4505–4512. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i1.6361>
- Irawan, E. F., & Rohman, F. (2025). Rekonstruksi Konsep Pendidikan Agama Islam Berbasis Etika Spiritual: Studi Kritis atas Pemikiran al-Ghazali. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 8(1), 164–184 <https://doi.org/10.24256/iqro.v8i1.6618>
- Iskandar, K., & Ansori, A. S. (2022). Pendidikan Islam Masa Pra Kemerdekaan; Telaah Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan. *Journal of Education and Religious Studies (JERS)*, 2(2). <https://doi.org/10.57060/jers.v2i02.61>
- Khairullina, A., & Fathonah, S. (2024). Rekonstruksi Pendidikan Sains Berbasis Nilai-Nilai Islam untuk Penguatan Keadilan Sosial. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(4), 234–250. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i04.5079>
- Munir, M. (2021). Integrasi Bidang-Bidang Ilmu (Sumber Ilmu dan Obyeknya). *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 16(1). <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana>.
- Nurdin, H. (2020). Masalah dan Krisis Pendidikan Islam Saat Ini dan di Masa Depan. *Jurnal Internasional Pendidikan Asia*, 1(1), 21–28. <https://doi.org/10.46966/ijae.v1i1.17>
- Parhan, M., dkk. (2022). Konsep Integrasi Pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional sebagai Upaya Menghindari Dikotomi Pendidikan di Indonesia. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.47945/alfikr.v8i1.266>
-

-
- Salim, A., Manubey, J., & Kuswandi, D. (2024). Neoliberalisme dan Dampaknya bagi Pendidikan Indonesia: Sebuah Refleksi. *Jurnal Pendidikan*, 24(2), 97–115. <https://doi.org/10.52850/jpn.v24i2.12484>
- Samrin. (2013). Dikotomi Ilmu dan Dualisme Pendidikan. *Jurnal Al-Ta'dib*, 6(1). <https://doi.org/10.31332/atdb.v6i1.300>
- Soleh, A. K. (n.d.). *Mencermati Konsep Islamisasi Ilmu Ismail R. Faruqi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2398>
- Yuda, P., dkk. (2021). Tantangan Pendidikan Indonesia dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Abad 21. *Current Research in Education: Conference Series Journal*, 1(1). <https://ejournal.upi.edu/index.php/crecs/article/view/32709>
-

Copyright Holder :

© Lailatul Qadariyah (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

